

Implementasi Program Kelas Ibu Hamil Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Urshella Syintania Fadilla

Ilmi Usrotin Choiriyah

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2024



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu isu gizi yang dihadapi Indonesia adalah stunting. tingkat stunting balita di Indonesia mencapai 24,4%. Angka ini dianggap masih tinggi jika dibandingkan dengan target Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) tahun 2024, yang bertujuan mengurangi prevalensi stunting balita di Indonesia menjadi 14%.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting 2021).

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Program kelas ibu hamil merupakan inisiatif untuk menyebarkan informasi seputar gizi dan kesehatan selama masa kehamilan. Materi yang disampaikan dalam program ini terfokus pada aspek perawatan kehamilan, khususnya persiapan dan pemenuhan kebutuhan gizi selama periode kehamilan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tabel 1. Jumlah Balita Yang Terindikasi Stunting Berdasarkan Wilayah Wonoayu

Nama	Wilayah RT/RW	Jumlah Ibu Hamil	
		2022	2023
Posyandu 1	RT 01,02,03 / RW 03 ; RT 03,04,05 / RW 2 ; RT 06 / RW 04	22	22
Posyandu 2	RT 01/RW04 ; RT 01,02,03 / RW 01 ; RT 01,02 / RW 02	25	26
Posyandu 3	RT 01,02 / RW 05	3	2
Posyandu 4	RT 04/RW01 ; RT 02,03,04,05 / RW 4	28	30
	Total	78	80

Sumber: Puskesmas Wonoayu (2024)

Berdasarkan tabel 1 terdapat sejumlah ibu hamil yang ada di di Desa Wonoayu. Dari data tersebut, terlihat bahwa Desa Wonoayu memiliki 4 posyandu, yang mana dari tahun 2023 yakni sebanyak 80 ibu hamil. Hal ini mengindikasikan peningkatan jumlah ibu hamil dari tahun sebelumnya, yaitu 2022, yang mencatat 78 ibu hamil.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tabel 2. Jadwal Pertemuan Program KIH

Pertemuan	Penyajian Materi	Alat Bantu
I (Bulan <u>Januari</u> 2024)	Pemeriksaan kehamilan agar ibu dan bayi sehat	Buku KIA, Lembar balik, Food Model/contoh makanan. <u>Stiker</u> P4K, <u>dil.</u>
II (Bulan <u>Februari</u> 2024)	Persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat bayi sehat	Buku KIA, Lembar Balik, Boneka Bayi, KB Kit, <u>dil.</u>
III (Bulan <u>Maret</u> 2024)	Pencegahan penyakit komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar ibu bayi sehat	Buku KIA, Lembar Balik, Metode Kanguru, Boneka, <u>dil.</u>
IV (Bulan April 2024)	Perawatan BBL agar tumbuh kembang optimal, pelayanan imunisasi seperti vaksin.	Buku KIA, Lembar Balik, Boneka Bayi, KB Kit, <u>dil.</u>

Sumber: Pemerintahan Desa Wonoayu (2024)

Pada tiap pertemuan kelas calon ibu, konten dan rincian sesi dari Pertemuan I hingga IV tercermin melalui Pedoman fasilitator, Panduan KIA, Kartu Pemutar, CD senam wanita mengandung, serta panduan senam calon ibu. Pelaksanaan pertemuan dimulai dengan fasilitator menyajikan materi-materi sesi calon ibu hamil. Sesudah itu, fasilitator bersama peserta mencapai kesepakatan mengenai materi yang akan dijelaskan di setiap pertemuan serta menetapkan jumlah pertemuan yang diperlukan guna merinci seluruh materi sesi calon ibu hamil. Keputusan ini akan disesuaikan dengan urutan materi dan kebutuhan prioritas setempat.

Rumusan Masalah

1. kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua mengenai retardasi pertumbuhan serta dalam menjaga gizi anak.
2. edukasi dari program kelas ibu hamil belum dilakukan secara pasif sehingga diketahui sebagian orang tua yang belum terlalu memahami tentang pentingnya dan manfaat dalam mengikuti kegiatan materi kelas ibu hamil tersebut.

Peneliti Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Malia, dkk (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dalam Upaya Pencegahan Stunting Studi Kasus di Desa Peusangan Kabupaten Bireuen)”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Maysara Edriani serta Repotan Hasibuan (2023) Dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Fasilitas Puskesmas Terjun Kota Medan”.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yola Bergi Sembiring (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Intervensi Gizi Spesifik Dalam Penurunan Stunting Oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Karo”

Metode

Jenis Penelitian	➔	Deskriptif Kualitatif
Teknik Pengumpulan Data	➔	wawancara, Observasi, Dokumentasi
Informan	➔	Petugas Laboratorium Gizi, Kepala Puskesmas, Kader Posyandu, Kepala Desa, Bidan Desa dan satu individu dari masyarakat yang memiliki balita stunting
Lokasi penelitian	➔	Pemerintah Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
Teori Penelitian	➔	George Edward III : 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi

Hasil Dan Pembahasan

Peneliti melakukan analisis terhadap penerapan program kelas ibu hamil dalam penanganan stunting dengan merujuk pada teori Edward III, yang menjelaskan bahwa implementasi mencakup empat dimensi: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), dan struktur birokrasi.

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan komponen penting dalam suatu perkumpulan agar para perintis dan pekerja dapat melaksanakan kewajibannya secara aktual dan efisien untuk mencapai tujuan hierarki. Oleh karena itu, korespondensi harus jelas sehingga dapat dipahami dengan baik. Ada beberapa sub-indikator yang perlu diterapkan dalam komunikasi kebijakan George Edward III agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai antisipasi, yaitu **Transmisi, konsistensi, dan kejelasan**.

1. Tranmisi

Dari pengambil kebijakan hingga pelaksana kebijakan, komunikasi ini bersifat satu arah. Dimensi transmisi ini menghendaki kebijakan publik dapat dikomunikasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.



Gambar.1 Undangan Sosialisasi Program Kelas Ibu Hamil

Berdasarkan wawancara yang telah di dapat, dari jumlah 80 undangan yang telah ~~disebar~~ ^{disebar} kepada masyarakat hanya sekitar 50 orang yang bisa menghadiri kegiatan sosialisasi terkait pengenalan program kelas ibu hamil dalam penanganan stunting. Dapat dilihat bahwa kebanyakan partisipasi dari masyarakat masih tergolong rendah dalam mengikuti sosialisasi, sehingga pemahaman masyarakat terkait stunting masih saja rendah dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak puskesmas dalam mencegah stunting belum dapat dikatakan berjalan optimal. Ini bisa diatasi dengan bagaimana pihak pemerintah bisa menangani dan melakukan penjemputan bolang kerumah masyarakat agar dapat disadari bahwa kesehatan pada ibu hamil sangat penting untuk diperhatikan.

2. Kejelasan

Dimensi

kejelasan juga mengharuskan bahwa kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak- pihak berkepentingan harus disampaikan dengan jelas, sehingga semua pihak dapat memahami maksud, tujuan, sasaran, serta inti dari kebijakan publik tersebut.



Gambar.2 Kegiatan Sosialisasi Program Kelas Ibu Hamil

Berdasarkan gambar.2 dalam pelaksanaan edukasi pencegahan stunting di kelas ibu hamil dapat dilihat bahwa ada banyak ibu-ibu hamil tidak mengetahui tentang stunting. Dalam kegiatan edukasi stunting diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terutama ibu-ibu hamil mengenai stunting, sehingga dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan stunting dan ikut memantau perkembangan pertumbuhan anak- anak mereka.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Wonoayu;

“Pelaksanaan kelas ibu hamil sudah melakukan kegiatan sesuai jadwal materi yang telah disepakati secara bersama”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, konsistensi dalam kegiatan program kelas ibu hamil sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian terkait indikator komunikasi pada implementasi program kelas ibu hamil sudah terlaksana, namun masih terdapat kendala terkait partisipasi dari masyarakat yang belum menyadari adanya sosialisasi tersebut. Yang perlu ditekankan adalah rutusnya jadwal sosialisasi pada kelas ibu hamil dalam pengenalan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder karena itu sangat penting sebelum dilaksanakan program kelas ibu hamil. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan semua elemen masyarakat dapat memberikan tanggapan dan dukungan agar kelas ibu hamil dapat dikembangkan dan berjalan sesuai dengan harapan.

3. Konsistensi

Komponen konsistensi ini juga diperlukan agar strategi yang diambil tidak tercampur aduk, sehingga membingungkan para pelaksana strategi, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang terlibat

Hasil Dan Pembahasan

B. Sumber Daya

Kebijakan tidak akan dapat mencapai tujuannya jika tidak mendapat dukungan sumber daya yang cukup secara kualitas dan kuantitas. Semua sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan disertakan dalam kumpulan sumber daya ini. Sub indikator dari sumber daya yakni; Sumber daya manusia, sumber daya pendanaan/anggaran, sumber daya peralatan, dan kewenangan.

1. Sumber Daya Manusia

SDM merupakan salah satu komponen yang berperan dalam menentukan hasil pelaksanaan suatu strategi.

Tabel. 3 Pelaksana Program Kelas Ibu Hamil

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Dr. Erwin Berthaningrum	Kepala Puskesmas	Bertanggung jawab pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan ibu hamil di wilayah kerjanya
2	Roida Ulyah, Amd. Keb	Bidan Desa	Mengidentifikasi calon peserta, koordinasi dengan stakeholder, fasilitasi pertemuan, monitoring, serta pelaporan
3	Mulyati	Kader Desa	Sebagai pembuat undangan, mempersiapkan tempat pelaksanaan program, alat bantu penyuluhan, serta konsumsi

Sumber: Puskesmas Wonorejo (2024)

Berdasarkan Tabel.3 diketahui bahwa petugas dalam pelaksanaan sudah memiliki tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan kelas ibu hamil telah dilakukan secara rutin di setiap desa dengan bidan desa sebagai fasilitator utama. Ini merupakan langkah positif dalam menggunakan kelas ibu hamil sebagai alat untuk mengatasi stunting. Selama pelaksanaan kelas ibu hamil, seharusnya bidan mendapatkan dukungan dari kader kesehatan desa untuk memastikan kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif. Idealnya, yang membantu bidan adalah kader kelas ibu hamil yang telah dibentuk oleh bidan bersama kepala desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kader posyandu lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas ibu hamil.

Hasil Dan Pembahasan

2. Sumber Anggaran

menurut Edward III, keterbatasan sumber daya anggaran dapat berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, kebijakan tidak akan dapat dijalankan secara efektif untuk mencapai tujuannya.

Tabel. 4 Sumber Dana Dan Anggaran Program Kelas Ibu Hamil

Uraian	Harga Satuan Tiap Pertemuan	Perhitungan Periode 2020-2024
Transport Bidan Desa	Rp. 25.000	Rp. 100.000
ATK	Rp. 50.000	Rp. 200.000
Konsumsi x 60 peserta	Rp. 47.000	Rp.2.820.000

Sumber : Bendahara Keuangan Puskesmas Wonoayu (2024).

Berdasarkan Tabel. 4 terlihat bahwa rncian kegiatan pertemuan kelas ibu hamil selama 1 periode dibiayai oleh BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Tahun Anggaran 2024 sebesar RP. 3.120.000. Dalam 1 periode pertemuan kelas ibu hamil selama 4 bulan dengan jumlah peserta ibu hamil terdapat 15 orang per pertemuan.

Hasil wawancara yang telah di dapat dari Bidan Desa Wonoayu bahwa, "fasilitas dan peralatan yang tersedia mencakup alat tulis seperti buku KIA, lembar balik untuk kelas ibu hamil, buku panduan untuk pelaksanaan kelas ibu hamil, buku panduan untuk kelas fasilitator, serta alat peraga seperti Kit KB, model makanan, boneka, tikar, atau karpet, dan buku panduan senam hamil atau CD senam hamil."

Selanjutnya berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi terkait ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai hanya saya penunjang pelaksanaan program dalam fasilitas ruangan kelas ibu hamil kurang luas sehingga untuk kenyamanan masih kurang maksimal.

4. Kewenangan

menurut Edward III, untuk melaksanakan suatu perintah, kewenangan umumnya perlu bersifat formal. Kewenangan mencakup hak dan tanggung jawab pelaksana dalam menerapkan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Tabel. 5 Wewenang di Desa Wonoayu beserta penanggungjawabnya

Wewenang	Penanggungjawab
Kepala Puskesmas	Bertanggung jawab pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan kelas ibu hamil di wilayah kerjanya.
Bidan Puskesmas	Mengidentifikasi calon peserta, koordinasi dengan stakeholder, fasilitasi pertemuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Kader Kelas Ibu Hamil	Sebagai membuat undangan, mempersiapkan tempat pelaksanaan program, alat bantu penyuluhan, dan konsumsi.
Kader Pendamping Ibu Hamil	Bertanggung jawab untuk mendata masyarakat di Desa Wonoayu pada tiap pos masing-masing.

Sumber : Bidan Desa Wonoayu (2024)

3. Sumber fasilitas

Menurut Edward III, sumber daya peralatan adalah fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan, mencakup gedung, lahan, dan alat-alat yang semuanya berperan dalam mempermudah penyediaan layanan selama implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara beserta Tabel. 5 menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab dalam implementasi program kelas ibu hamil adalah Kepala Puskesmas. Tugas Kepala Puskesmas sebagai penanggungjawab untuk menkoordinir dalam implementasi kelas ibu hamil di wilayah kerjanya, yang nantinya akan menunjuk Bidan Desamasing-masing untuk melakukan identifikasi calon peserta, mengkoordinir dengan stakeholder, dan membuat jadwalmateri pada pelaksanaan kelas ibu hamil tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

C. Disposisi

Salah satu faktor terpenting yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Pemahaman terhadap kebijakan, respon terhadap kebijakan, dan komitmen pelaksanaan kebijakan merupakan tiga faktor yang mempengaruhi disposisi tersebut

1. Pemahaman

Menurut Edward III dalam teorinya tentang implementasi kebijakan publik, pemahaman adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini terkait bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan memahami tujuan, proses, dan cara pelaksana kebijakan tersebut.



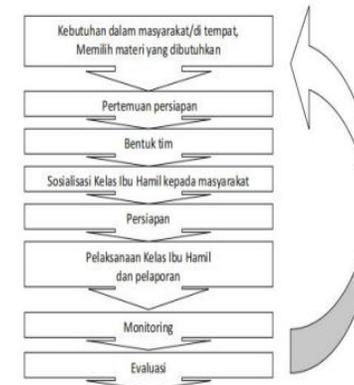
Gambar 3. Rapat Koordinasi Pelaksana Program KIH

Berdasarkan Gambar.3 yang dilakukan telah menunjukkan bahwa kader memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik serta berpengalaman tentang program kelas ibu hamil. Hal ini disebabkan karena semua kader telah mengikuti pelatihan di tingkat kecamatan dan kabupaten, serta telah lama berperan sebagai kader posyandu. Dengan pengalaman tersebut, mereka menjadi kompeten dalam melaksanakan program kelas ibu hamil di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Pelatihan yang diikuti oleh kader merupakan program wajib dari puskesmas setempat dan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh kepala desa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kader dalam menangani masalah stunting di desa. Dengan demikian, pelatihan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kapasitas kader terkait gizi seimbang dan pencegahan stunting.

Hasil Dan Pembahasan

2. Komitmen

bahwa komitmen merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan



Gambar. 4 Skema kegiatan pelaksanaan program kelas ibu hamil.

Berdasarkan Gambar. 4 Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan, yang meliputi survei pada kelompok sasaran, konfirmasi, serta koordinasi dengan kepala desa dan bidan desa setempat, serta persiapan sarana dan prasarana. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan pemahaman isi buku KIA, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab berdasarkan pedoman buku KIA. Tahap terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Dari kegiatan ini, akan terlihat peningkatan pemahaman ibu hamil mengenai buku KIA. Hasil penelitian berdasarkan wawancara terkait indikator disposisi pada program kelas ibu hamil dalam sub indikator pemahaman bahwa pelaksana program sudah cukup baik dalam menguasai materi terbukti bahwa Tujuan dari pelatihan para pelatih (TOT) Dinas Kesehatan adalah untuk mendidik fasilitator di kabupaten, kelurahan, dan desa tempat diadakannya kelas ibu. Selain itu, respon pelaksana tercatat cukup memuaskan pada subindikator dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Subindikator komitmen pelaksanaan program kelas ibu hamil juga konsisten tinggi sepanjang tahapan sesuai dengan pedoman yang telah ada.

Berdasarkan wawancara yang telah didapat dari Ibu Kader Kelas Ibu Hamil bahwa, “ Para kader yang sudah di berikan materi telah mendapatkan respon/tanggapan yang baik, dan para kader juga sudah cukup memahami dalam pelaksanaan program kelas ibu hamil “. Berdasarkan wawancara tersebut, respon dari para pelaksana sudah cukup baik dan mereka bisa memahami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.

3. Respon

indikator selanjutnya yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu adanya respon yang baik dari para pelaksana untuk bersedia melaksanakan kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil apabila para pelaksana memiliki perbedaan pendapatan dan kurang mendukung untuk melaksanakan kebijakan

Hasil Dan Pembahasan

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan indikator terakhir Edward III dalam teorinya tentang implementasi kebijakan. Salah satu komponen yang paling memungkinkan untuk menjalankan aktivitas secara keseluruhan adalah struktur ini. Organisasi swasta maupun lembaga pemerintah menunjukkan birokrasi. Fragmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dua ciri utama struktur birokrasi.

1. Fragmentasi

Fragmentasi ialah usaha untuk mendistribusikan tanggung jawab aktivitas pegawai di antara berbagai unit kerja, dengan tujuan mengurangi dampak tekanan eksternal dan meningkatkan fungsi koordinasi dalam suatu kebijakan.

Tabel. 6 Prosedur Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil

Prosedur	
	1. Tahap Persiapan
	A. Petugas melakukan identifikasi atau mendata semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja kemudian menentukan peserta yang akan mengikuti kelas ibu hamil
	B. Petugas mempersiapkan tempat dan sarana
	C. Petugas mempersiapkan materi, alat bantu, penyuluhan dan jadwal pelaksanaan
	D. Petugas mengundang ibu hamil yang telah ditentukan sebagai peserta dengan umur kehamilan antara 20mgg sampai 32mgg
	E. Petugas mempersiapkan tim pelaksana kelas ibu hamil sebagai fasilitator dan narasumber
	F. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan
	G. Akhir pertemuan dilakukan senam ibu hamil sebagai kegiatan extra
	H. Menentukan waktu pertemuan yang ditentukan kesiapan peserta
	2. Tahap Pelaksanaan
	A. Penjelasan umum ibu hamil dan pengenalan peserta sebelum pertemuan pertama dilakukan pretes
	B. Penyampaian materi

Sumber : Puskesmas Wonoayu (2024).

Berdasarkan tabel. 6 dalam struktur birokrasi dalam program kelas ibu hamil memberikan gambaran tentang pada saat melaksanakan kebijakan dan menjalankan kewenangannya, terdapat pembagian tugas yang terstruktur untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas saat mengimplementasikan kebijakan.

Hasil wawancara dari Bidan Desa mengatakan bahwa, “atas implementasi kebijakan kelas ibu hamil di Desa Wonoayu juga terdapat SOP (Standart Operational Prosedure) yang sudah berjalan dengan baik dan di jadikan sebagai pedoman “. Dengan demikian, untuk pelaksanaan program kelas ibu hamil, bisa dilihat bahwasanya struktur birokrasi yang ada telah terbentuk dengan baik, di mana terdapat SKPD yang memiliki wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Hasil penelitian berdasarkan wawancara terkait indikator struktur birokrasi pada program kelas ibu hamil sudah dikatakan cukup optimal karena ada pembagian kerja seperti rupa jadi tidak ada tumpang tindih implementasi tugas saat implementasi.

2. SOP

SOP merupakan serangkaian aktivitas rutin yang bisa pegawai ataupun pelaksana kebijakan, baik itu administratur maupun birokrat, guna menjalankan tugas sehari-hari mereka selaras atas standar yang sudah ditentukan (standar minimum yang diperlukan atas masyarakat)

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian terkait implementasi program kelas ibu hamil dalam penanggulangan stunting pada Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ditinjau atas 4 aspek dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pertama, indikator pada komunikasi belum cukup optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya kesadaran para ibu hamil terkait pentingnya program kelas ibu hamil dalam penanggulangan stunting pada Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Kedua aspek sumber daya sudah cukup optimal hal ini dibuktikan dengan berbagai aspek sumber daya baik itu sumber daya manusia, sumber pendanaan atau anggaran, sumber daya peralatan serta kewenangan sudah struktur, memadai, terkelola dan terlaksana dengan baik. Ketiga aspek disposisi, sudah cukup optimal hal ini dibuktikan dengan bahwa dinas kesehatan telah melakukan pelatihan (TOT) dengan tujuan untuk melatih fasilitator ditempat pelaksanaan program kelas ibu hamil dari tingkat kabupaten hingga desa selain itu respon yang diberikan dalam pelaksanaan juga sudah cukup baik, dimana para ibu hamil sudah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan komitmen masing-masing. Keempat aspek struktur birokrasi telah cukup optimal hal ini dibuktikan atas terdapatnya SKPD yang birokrasinya sudah terstruktur dengan baik selain itu dapat pembagian kerja dalam pelaksanaan dan implementasinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Referensi

- [1] N. Khoiriyah et al., “Edukasi Tentang Stunting dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pada Ibu Balita di Desa Garangwangi Kabupaten Majalengka,” vol. 6, pp. 1236–1242, 2023.
- [2] A. D. N. Yadika, K. N. Berawi, and S. H. Nasution, “Pengaruh stunting terhadap perkembangan kognitif dan prestasi belajar,” *Jurnal Majority*, vol. 8, no. 2, pp. 273–282, 2019.
- [3] O. A. N. Ichsan, G. W. Priyambodo, I. Noviana, K. D. Rahmawati, and M. Nurhuda, “Efektivitas Pendampingan Dan Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Pada Anak Penderita Stunting Di Kelurahan Semanggi Provinsi Jawa Tengah,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, vol. 6, no. 1, p. 731, 2022, doi: 10.31764/jmm.v6i1.6612
- [4] A. Diva Afrizal and I. Rodiyah, “Implementation of the Health Literacy Program in Handling Stunting in Tambak Kalisogo Village,” pp. 1–7, 2023, [Online]. Available: <https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/view/866/version/858>.
- [5] I. Y. Arulampalam Kunaraj, P. Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, ” *Journal of Engineering Research*, vol. 2, no. 10, pp. 6791–6798, 2023.
- [6] R. Kusuma, A. Novita, and I. Jayatmi, “Evaluasi Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (Hpk) Dalam Pencegahan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Rias Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023,” *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, vol. 1, no. 5, pp. 395–405, 2023, doi: 10.55681/armada.v1i5.533.
- [7] Y. Satriyandari and B. A. Estri, “IBM pendampingan kelas Ibu hamil untuk meningkatkan kesehatan Ibu & Janin IBM class assistance for pregnant women to improve mother & fetal health,” vol. 4, pp. 233–243, 2024.
- [8] Fuat Khafifi et al., “Program Pemberian Makanan Tambahan Dalam Upaya Penanganan Stunting Di Desa Pagerejo Kec. Kertek Kab. Wonosobo,” *Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan*, vol. 2, no. 3, pp. 28–34, 2022, doi: 10.55606/jpikes.v2i3.560.

Referensi

- [9] I. S. Nasution and Susilawati, "Analisis Faktor Penyebab Kejadian Stunting Pada Balita Usia 0-59 Bulan," *Ilmiah Kesehatan*, vol. 1, no. 2, pp. 1–6, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/florona/index> Analisis.
- [10] S. Suparmi et al., "Pendampingan Mahasiswa Dan Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan, Nifas Dan Bayi Baru Lahir Di Tujuh Kabupaten/Kota Di Indonesia," *Jurnal Ekologi Kesehatan*, vol. 18, no. 3, pp. 192–200, 2020, doi: 10.22435/jek.v3i18.2307.
- [11] A. Malia, F. Farhati, S. Rahmah, D. Maritalia, N. Nuraina, and D. Dewita, "Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dalam Upaya Pencegahan Stunting," *Jurnal Kebidanan*, vol. 12, no. 1, pp. 73–80, 2022, doi: 10.35874/jib.v12i1.1015.
- [12] M. Edriani and R. Hasibuan, "Implementasi Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Upt Puskesmas Terjun Kota Medan," *Jurnal Kesehatan Tambusai*, vol. volume 4, no. Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting, pp. 4162–4172, 2023.
- [13] Y. B. S. Sembiring, "Implementasi Program Intervensi Gizi Sensitif Dan Gizi Spesifik Dalam Penurunan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Karo," ... Spesifik Dalam Penurunan Stunting ..., 2023, [Online]. Available: http://eprints.ipdn.ac.id/13302/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/13302/1/ringkasan_penelitian_104443.pdf.
- [14] L. Nurva and C. Maharani, "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, vol. 12, no. 02, pp. 74–83, 2023.
- [15] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [16] R. Wardah and F. Reynaldi, "Peran Posyandu dalam Menangani Stunting di Desa Aringan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya," *Jurnal Biologi education*, vol. 10, no. 1, pp. 65–77, 2022

Referensi

- [17] N. Handayani, D. R. Nurmayanti, dan R. Nugroho, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat," *J. Kebijak. Pemerintah.*, vol. 4, no. 1, hal. 32–40, 2021, doi: 10.33701/jkp.v4i1.1564.
- [18] D. R. Sunaryo, C. Candradewini, dan R. Arifianti, "Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung," *Responsive*, vol. 4, no. 4, hal. 205, 2022, doi: 10.24198/responsive.v4i4.34716.
- [19] S. Sunarto, "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Ii," *J. Ilmu Adm. dan Stud. Kebijak.*, vol. 3, no. 2, hal. 97–112, 2021, doi: 10.48093/jjask.v3i2.50.
- [20] 2022) (Iqbal, "IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI PUSKESMAS KEDUNG I KABUPATEN JEPARA," *הארץ*, no. 8.5.2017, hal. 2003–2005, 2022.
- [21] N. Luh, E. Mulyanti, I. K. Winaya, dan P. D. Yudhartha, "Implementasi Program Mobil Sehat Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabanan".
- [22] N. Nurlailah, "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu," *J. Din.*, vol. 1, no. 2, hal. 59–68, 2021, doi: 10.54895/dinamika.v1i2.1135.
- [23] J. Kusbandiyah, "Analisis Implementasi Program Kelas Ibu hamil," *J. Ilm. Kesehat. Media Husada*, vol. 02, no. 01, hal. 111–118, 2017.
- [24] A. NURDAYANTI, "... KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Penerapan ...," 2022.

Referensi

- [25] I. K. Sari et al., “Edukasi pencegahan stunting di kelas ibu hamil,” *DIklat Rev. J. Manaj. Pendidik. dan Pelatih.*, vol. 6, no. 3, hal. 4–7, 2022.
- [26] Faisal, “Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah,” *J. Ilmu Adm. Media Pengemb. Ilmu dan Prakt. Adm.*, vol. 10, no. 3, hal. 343–359, 2013.
- [27] C. Cindy dan F. Trimurni, “Implementasi Program Siap Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak (Program Si Adik) Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai,” *PUBLIKA J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 10, no. 1, hal. 87–101, 2024, doi: 10.25299/jiap.2024.16400.
- [28] A. Calam, *Kebijakan Pengembangan Dosen: Perumusan, Implementasi, Dampak dan Dukungan*. 2020.
- [29] S. Sudarmi, “Evaluasi Implementasi Program Kelas Ibu Hamil (KIH),” *J. Kesehat.*, vol. 12, no. 3, hal. 381, 2021, doi: 10.26630/jk.v12i3.2795.
- [30] N. R. Br Simbolon, M. Sihombing, H. Kusmanto, dan I. Isnaini, “Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat,” *Strukt. J. Ilm. Magister Adm. Publik*, vol. 1, no. 2, hal. 147–155, 2019, doi: 10.31289/strukturasi.v1i2.32.
- [31] H. Akib, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar,” *J. Adm. Publik*, vol. 1, no. 1, hal. 1–11, 2010.
- [32] mujianto solichin, “Imlementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi,” *J. Stud. Islam*, vol. 6, no. 2, hal. 148–178, 2015.

